

BULETIN

BIOENERGI

Edisi Desember 2019

www.aprobi.or.id



**PRESIDEN JOKOWI:
BAPAK BIODIESEL
INDONESIA**

Penanggung Jawab

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia
(APROBI)

Dewan Redaksi

Pengurus APROBI

Alamat Redaksi

Multivision Tower, Lantai 11,
Jl Kuningan Mulia Lot 9B

**Buletin ini diterbitkan oleh
Asosiasi Produsen Biofuels
Indonesia (APROBI)**



*Redaksi menerima kiriman artikel
opini, naskah berita, foto, dan
karikatur. Naskah bisa dikirimkan
melalui pos ke Alamat Redaksi atau
melalui email: office@aprobi.or.id.
Redaksi berhak mengedit dan
mengubah tulisan tanpa mengubah
makna dari tulisan tersebut.*

Biofuelpedia

Bioavtur merupakan hasil proses hidrodoksigenasi dari bahan minyak lemak dengan rangkaian C rendah (sekitar C12) yang antara lain terdapat di minyak inti kelapa sawit dan minyak kelapa.

(Litbang Kementerian Pertanian RI)

Pembaca yang terhormat,

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menerbitkan

buletin Bioenergi pada bulan Desember 2019. Buletin yang mulai dipublikasikan semenjak pertengahan tahun 2016 ini menginformasikan perkembangan terkini di industri biodiesel dan pada umumnya industri sawit.

Rubrik Laporan Utama, mengangkat gerak cepat pemerintah dalam rangka menjalankan program B30 pada 2020. Seluruh kementerian dan instansi bersatupadu mewujudkan program ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penggunaan B30 harus dapat dijalankan tahun depan atau tepatnya 2020. Dirinya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas apabila program ini diganggu oleh pihak-pihak tertentu. Pasalnya, ia ingin program ini berjalan bagus dan sukses sehingga defisit neraca perdagangan dapat dikurangi. Yang paling utama, Indonesia semakin meningkatkan penggunaan minyak sawit di dalam negeri. Alhasil, masyarakat

**SELAMAT
DATANG
B30**

Indonesia dapat menikmati produk bangsa sendiri yaitu minyak sawit.

Di Rubrik Teropong, kami mengulas uji pemanfaatan

B30 untuk kereta api. Uji coba ini dilakukan pada genset kereta api selama 1.000 jam. Uji coba B30 pada kereta api merupakan salah satu persiapan pemerintah dalam rangka implementasi program B30 yang dimulai tahun 2020 mendatang.

Pembaca, kami harapkan buletin Bioenergi membantu penyebaran informasi positif mengenai peranan biodiesel kepada negara ini. Dengan begitu dukungan masyarakat terhadap industri biodiesel dapat terus meningkat dan memahami pentingnya kehadiran industri bioenergi. Selamat membaca.



AKADEMISI: KAMPANYE ANTI-SAWIT BAGIAN PROTEKSI EROPA

Kampanye global antisawit terkait kesehatan sebenarnya hanya merupakan kamuflase strategi Uni Eropa (UE) untuk memperkuat serapan minyak nabatinya di pasar global. Pendapat itu dilontarkan Prof. Pietro Paganini dari John Cabot University of Roma dalam *Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook* di Nusa Dua, pada akhir Oktober 2019

Paganini mengatakan beragam kampanye yang dilakukan untuk mencederai reputasi sawit demi memperkuat pasar minyak nabati global, salah satunya pelabelan *palm oil free*. Kampanye ini lebih condong digunakan untuk memengaruhi persepsi negatif publik terhadap sawit tentang kesehatan. Menurutnya, masyarakat perlu menyadari bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye hitam produsen minyak nabati yang bersaing oleh minyak sawit. "Sayangnya, kampanye juga ditunggangi oleh pihak lain seperti para pelaku industri makanan, NGO, dan kelompok politik di negara produsen sawit," ujarnya.

Kampanye antisawit dianggap berhasil karena mampu menurunkan impor minyak sawit di beberapa negara besar UE. Dua di antaranya adalah Prancis dan Jerman. Kenaikan impor produk minyak sawit hanya terjadi di Spanyol, sedangkan permintaan Italia cenderung stagnan. Secara umum tren pandangan



negatif terhadap sawit di Uni Eropa meningkat. "Sering ditemukan publikasi yang menyatakan sawit merupakan musuh utama kesehatan," tuturnya.

Menurut Paganini, keberhasilan kampanye antisawit karena banyak negara di Eropa sangat concern terhadap isu kesehatan dibandingkan isu deforestasi. "Hal ini menyebabkan penurunan permintaan sawit hingga -3,6% per tahun. Padahal hasil studi menunjukkan bahwa lemak jenuh yang berasal dari kelapa sawit tidak berbeda dibandingkan sumber nabati yang lain," ungkap Paganini.

Menurut Paganini, produk makanan dan minuman yang dibuat tanpa kandungan sawit sebenarnya tidak menjamin rasa yang lebih baik dan meningkatkan preferensi konsumen untuk membeli. (*)

PRESIDEN JOKOWI TERBITKAN RANCANGAN AKSI NASIONAL SAWIT



Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024. Tujuan Inpres meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Inpres tersebut ditujukan kepada: Menko Bidang Perekonomian; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Keuangan; Menteri Pertanian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Luar Negeri; Menteri Perdagangan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Ketenagakerjaan; Menteri

Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Sekretaris Kabinet; Kepala Badan Informasi Geospasial; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan RAN KSB Tahun 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yang terdiri atas: Melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur; Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun; Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

RAN KSB memuat 28 kegiatan yang akan dilakukan selama periode 2019-2024. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari perusahaan, petani, pemerintah daerah, dan Para menteri, gubernur, dan bupati/walikota diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAN KSB Tahun 2019-2024 kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan kepada Presiden tentang pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut. "Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan," bunyi akhir Inpres tersebut yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019.



PROGRAM B30 RESMI BERJALAN 2020

Pemerintah sangat konsisten mewujudkan program mandatori biodiesel campuran 30% atau B30. Seluruh instansi pemerintah bergerak cepat supaya B30 terealisasi pada 2020.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penggunaan B30 harus dapat dijalankan tahun depan atau tepatnya 2020. Dirinya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas apabila program ini diganggu oleh pihak-pihak tertentu.

“Kenapa tidak dikerjakan dari dulu? Sebab ada yang senang

impor minyak. Saya tahu pemain impor itu siapa sekarang. Sudah saya sampaikan, kalau ada yang mau ganggu B20 B30, pasti akan saya gigit orang itu,” tegas Jokowi di penghujung November 2019.

Jokowi menjelaskan penggunaan biodiesel untuk campuran solar ini bisa dilakukan sejak dulu. Namun, menurut dia, karena ulah oknum-oknum penggemar impor membuat kebiasaan impor migas ini sulit

dilepaskan dari Indonesia.

“Kita senang impor. Siapa? Ya orang-orang yang senang impor, yang tidak mau diganggu kebiasaan impornya ini. Ini yang akan saya ganggu,” ucapnya.

Saat ini pemerintah sudah menjalankan penggunaan B20 (biodiesel 20 persen) dan akan ditingkatkan menjadi B30 pada Januari mendatang. Semakin besar kandungan biodiesalnya maka semakin sedikit campuran solar yang ada dalam BBM tersebut sehingga akan mengurangi penggunaan minyak dalam negeri.

“Sebentar lagi Januari B30, masuk lagi B50 bisa berjalan, artinya impor minyak kita turun secara drastis. sehingga urusan neraca perdagangan dan transaksi berjalan kita jadi lebih baik,” paparnya.

Jokowi menjelaskan pemerintah akan terus meningkatkan ekspor dan produk substitusi impor. Pemerintah akan terus meningkatkan sumber daya alam yang ramah lingkungan tanpa merugikan siapapun.

“Kita tahu sekarang ini yang banyak kita ekspor barang-barang mentah, baik itu timah nikel bauksit batubara. Padahal kalau ini diolah, dalam turunan menjadi barang setengah jadi atau jadi ini akan meningkatkan nilai tambah luar biasa,” katanya. Strategi yang akan dijalankan Indonesia adalah menjadi produsen mobil listrik.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menuturkan menilai implementasi biodiesel 30% (B30) dapat menghemat devisa sampai US\$ 8 miliar atau setara Rp 112,81 triliun. Sebab, minyak kelapa sawit mentah atau crude



Sudah saya sampaikan, kalau ada yang mau ganggu B20 B30, pasti akan saya gigit orang itu,”

**Joko Widodo //
Presiden Republik Indonesia**

palm oil (CPO) yang akan terserap diproyeksi mencapai 10 juta kiloliter.

Apabila impor solar dapat ditekan, maka neraca dagang pemerintah semakin membaik. “Program ini (B30) sangat membantu mengurangi defisit neraca perdagangan,” kata Airlangga.

Saat ini, ia menjelaskan pemerintah tengah mempersiapkan roadmap pelaksanaan program tersebut. Nantinya akan digabungkan dalam satu peraturan jangka panjang menangani defisit neraca perdagangan.

“Ini sedang kita siapkan juga dengan berbagai kementerian programnya adalah terkait dengan defisit neraca perdagangan dan pengurangan CAD (*Current Account*

Deficit). Beberapa program itu adalah mandatori B20. Bahkan kita siapkan roadmap B50 bahkan B100,” ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penerapan B30 diharapkan mampu menekan impor energi Indonesia sampai 50 persen pada 2020. “Kalau kita bikin nanti 1 Desember mulai dengan B30, saya pikir kita akan bisa mendekati hampir 50 persen di tahun depan,” kata Luhut pada pertengahan November 2019.

Sementara untuk penerapan B20 yang sudah berjalan, mampu mengurangi impor energi Indonesia hingga 23 persen, berdasarkan data per September 2019. “Kalau kita sampai B50, baru kita ketemu lagi. Kita nggak perlu urusan sama EU (Uni Eropa). Kita memohon, memohon selama ini supaya kita bisa ekspor ke sana,” tegasnya.

Gerak cepat juga dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melakukan uji coba pendistribusian bahan bakar campuran 30 persen biodiesel pada minyak solar (B30). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menjelaskan penggunaan biodiesel akan menjadi prioritas percepatan capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional melalui mandatori B30 (campuran 30% biodiesel pada minyak solar) siap diimplementasikan awal 2020.

“Untuk B30 sudah siap, ini tinggal (memastikan) suplainya, tinggal dijalankan,” tegas Arifin. Saat ini minyak bakar jenis solar di pasaran telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biodiesel) sebanyak 20 persen atau yang disebut B20.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan menilai implementasi biodiesel 30% (B30) dapat menghemat devisa sampai US\$ 8 miliar atau setara Rp 112,81 triliun.

la mengatakan, untuk melakukan terobosan-terobosan baru perlu dilakukan dengan cara bertahap, mulai dari B30 hingga B50 itu harus dilakukan pengecekan kesesuaian untuk pemakaian. "Ini kita harus menjaga kualitas saat di transportasi dari aspek keamanannya," imbuhnya.

Sebagai payung hukum uji coba tersebut, Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 227 K/10/MEM/2019 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis B30 ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode 2019. Beleid tersebut diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 15 November 2019 lalu.

Distribusi B30 melibatkan badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) dan badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM). BUBBN mengirimkan biodiesel ke BUBBM. Setelah diterima, BUBBM akan mencampur biodiesel ke minyak solar sebelum didistribusikan ke masyarakat. Melalui penerbitan kepmen ini, persiapan pendistribusian B30 akan menjadi lebih baik. Ujung-ujungnya, akan ada tambahan penghematan devisa negara dari berkurangnya impor solar sekitar 10 persen sebagai tambahan dari program sebelumnya B20.

Uji coba pendistribusian B30 sebagai bahan bakar sudah

dilaksanakan di delapan wilayah distribusi yaitu, Terminal BBM (TBBM) Rewulu, TBBM Medan, TBBM Balikpapan, TBBM Plumpang, TBBM Kasim, TBBM Plaju, TBBM Panjang dan TBBM Boyolali Jawa Tengah.

Dengan dimulainya percobaan pendistribusian B30 ini, pemerintah memperkirakan akan terdapat penambahan bahan bakar nabati yang terserap sekitar 72 ribu liter biodiesel hingga akhir uji coba. Sebagai catatan, pemerintah mengalokasikan mandatori B20 sekitar 6,6 juta kiloliter biodiesel hingga akhir 2019.

Insentif kendaraan B30

Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif untuk mendukung program campuran solar dengan minyak nabati atau biofuel. Mulai tahun depan, campuran minyak nabati sebesar 30 persen atau B30 akan diterapkan dan ditargetkan terus meningkat secara bertahap hingga B100.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menyatakan salah satu insentif yang tengah disiapkan berupa keringanan pajak. Dia mengusulkan ada pengurangan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM untuk kendaraan bermotor berbahan bakar biofuel atau *flexi engine*.

"Kalau kendaraan penumpang lain pajaknya di atas 15 persen, pajak kendaraan dengan *flexi engine* diberi

8 persen," katanya di Jakarta, Rabu 4 Desember 2019, seperti dilansir dari laman *tempo.co*.

Insentif itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang PPnBM. Di dalamnya juga diatur mengenai insentif untuk kendaraan listrik. Putu menuturkan, kebijakan ini kemungkinan baru akan efektif dua tahun mendatang saat kendaraan sudah dapat memenuhi standar emisi Euro 4.

Menurut Putu kebijakan ini dapat membantu produsen otomotif untuk terus mengembangkan kendaraan berbahan bakar biofuel. Usai penerapan B20 sejak 2018, pemerintah akan beralih ke B30 mulai 1 Januari 2020. Pemerintah telah menyatakan uji coba penggunaan B30 tak banyak menimbulkan masalah. Targetnya, pemerintah akan menerapkan B100 pada 2021 nanti. (*)



Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penerapan B30 diharapkan mampu menekan impor energi Indonesia sampai 50 persen pada 2020

B30 TINGKATKAN PENYERAPAN SAWIT DI DALAM NEGERI



Konsumsi biodiesel tahun 2020 dengan adanya wajib penerapan B30 mencapai 8,09 juta ton atau sekitar 9,4 juta kiloliter. Hal ini diungkapkan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan saat menjadi pembicara di acara *15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook* di Nusa Dua, Bali, pada November 2019.

“D

engan kapasitas terpasang sekitar 12 juta kiloliter, utilisasi sekitar 80-90%, artinya ruang untuk ekspor akan semakin tipis. Tapi, kemungkinan, pada tengah tahun depan, akan ada tambahan kapasitas yang siap beroperasi, sekitar 1 juta kiloliter. Saya mengundang para pemain biodiesel/minyak sawit, agar mau berinvestasi membangun industri biodiesel di Indonesia,” kata Paulus.

Ia mengaku optimistis program B30 mulai Januari 2020 juga dapat berjalan lancar dan persediaan bahan baku siap menopangnya, mengingat tingkat penerimaan industri otomotif terhadap biodiesel B20 selama ini berjalan lancar.

Paulus mengatakan bahwa selama ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), serta berbagai asosiasi lainnya seperti alat berat selalu ikut serta dalam riset dan uji coba penggunaan biodiesel. “Saya tidak melihat adanya hambatan dalam pelaksanaan program biofuel ini karena kita bisa berjalan bersama-sama,” ujarnya.

Seperti diketahui Pemerintah saat ini tengah mendorong industri kendaraan BBN dengan campuran sawit 20% (B20), 30% (B30) bahkan hingga 100% (B100). Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan konsumsi biodiesel di pasar domestik, sehingga menyerap produksi minyak sawit (*crude palm oil/CPO*) Indonesia yang melimpah.

Berbicara soal pengurangan emisi, Paulus juga menyampaikan banyak sekali nilai strategis biofuel seperti reduksi emisi gas dengan target di tahun 2020 sebanyak 26% dan 29% untuk 2030 sesuai dengan komitmen *Nationally Determined Contributions UNFCCC*.

Hal ini didukung penuh oleh peneliti dari *Center for Catalysis and Reaction Engineering* Institut Teknologi Bandung (CaRE ITB), I Gusti Bagus Ngurah Makertihartha bahwa Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit harus bisa menggunakan bahan bakar dari kelapa sawit.

“Semua *stakeholder* yang terkait harus berkonsolidasi mengembangkan infrastruktur industri biofuel minyak sawit agar

mandatori B30 bisa terlaksana”, kata Gusti.

Ia menambahkan bahwa sejak 1983 tim riset ITB sudah bekerja sama dengan Pertamina dan Riset Dikti untuk memulai penelitian mengenai pengolahan minyak nabati menjadi biofuel. Produk penelitian menghasilkan katalis yang mampu mencampur senyawa hidrokarbon minyak nabati dengan bahan bakar fosil sehingga dapat menjadi biofuel.

Paulus Tjakrawan menegaskan bahwa industri otomotif sangat mendukung penggunaan biodiesel B20. “Kami sangat optimis program B30 mulai Januari 2020 dapat berjalan dan bahan baku siap menopangnya,” terangnya.

“Jadi kita tidak jalan sendiri tetapi bersama-sama yang lain juga. Sehingga saya tidak melihat adanya hambatan dalam program penerapan bahan bakar ramah lingkungan (biofuel) ini,” katanya.

Saat ini, pemerintah Indonesia memang tengah mendorong industri kendaraan bermotor dan alat berat bermesin seperti alat berat dan lainnya agar dapat menghasilkan teknologi yang menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan campuran di atas 20 persen (B20) hingga 100 persen (B100). (*)

MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI)

PRODUSEN BERKOMITMEN PENUHI KEBUTUHAN B30

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) sangat siap menjalankan program biodiesel 30 persen (B30) pada awal 2020.

Ketua Umum APROBI, MP Tumanggor mengatakan, pemerintah dan Presiden Jokowi sudah dari jauh hari memutuskan pemberlakuan B30 pada 1 Januari 2020. Karena itu, dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya bersama Pertamina dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM telah melakukan beberapa kali pertemuan.

"Nah agar semua siap, per 1 Desember 2019 mulai uji coba B30 di beberapa lokasi. Tujuannya agar pas pemberlakuan tahun depan sudah tidak ada masalah," katanya di Jakarta, Jumat (29/11).

"Apalagi hasil uji jalan B30 berjalan baik dan hasilnya sangat baik," tambah Tumanggor.

Menurut dia, program B30 akan menyerap sekitar 9,6 juta kiloliter (KL) CPO. Saat ini, kata dia, ada 19 produsen biodiesel dengan produksi 12 juta KL. Diharapkan pada 2020 produknya bisa naik jadi 14 juta KL. Menurut Tumanggor, B30 adalah kebijakan pemerintah yang harus didukung oleh semua pihak termasuk dalam hal ini Industri otomotif. Jangan ada pihak yang beranggapan bahwa hal ini seakan akan keinginan dari pihak produsen biodiesel saja.

"Jadi semua pihak harus saling menyesuaikan. Demikian pula Pertamina. Pertamina kiranya segera dapat membangun tangki

timbun di beberapa tempat sehingga cost bisa diturunkan," ujarnya.

Sebagai informasi bahwa kapasitas terpasang produksi biodiesel mencapai 12 juta kiloliter yang dihasilkan dari 19 perusahaan. Peningkatan pemakaian biodiesel menjadi B30 diperkirakan akan menaikkan konsumsi di dalam negeri menjadi 9 juta kiloliter.

"Produsen siap mendukung program B30 yang dicanangkan pemerintah. Kapasitas produksi kami mampu penuhi kebutuhan dalam negeri," tegas Tumanggor.

Berdasarkan data Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (Imatap) Kemenperin bahwa penerapan biofuel diesel terbaru lebih mudah ketimbang peralihan ke kendaraan listrik. Selain itu, pengeluaran emisi kendaraan berbahan bakar B30 lebih rendah sehingga akan berdampak baik kepada lingkungan. Bahan bakar diesel pengganti B20 ini saat diuji menghasilkan penurunan dampak terhadap lingkungan, yakni emisi CO₂ turun sebesar 0,1 – 0,2 gram/km dan emisi PM (Particular Matter) turun sebesar 0,01 – 0,08 gram/km. (*)



KERETA API DIUJICoba GUNAKAN B30

Pemerintah melaksanakan uji pemanfaatan biodiesel 30% (B30) pada alat mesin pertanian (alsintan), alat berat sektor pertambangan, kereta api, dan angkutan laut.

Direktur Bioenergi Andriah Feby Misna menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bahan bakar B30 dengan bahan bakar B20. Meski telah selesai melakukan uji coba, saat ini pemerintah masih menyelesaikan tahap finalisasi laporan akhir.

“Rekomendasi yang dihasilkan merupakan rekomendasi yang dapat kita lakukan bersama-sama,” katanya seperti dikutip dalam rilis Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI.

Menurutnya, seluruh uji pemanfaatan B30 merupakan salah satu persiapan pemerintah dalam rangka implementasi mandatori penggunaan B30 yang akan dimulai pada 2020. Selain itu, kualitas produk biodiesel untuk pencampurannya pun semakin ditingkatkan.

Pemerintah juga melakukan pengawasan atau monitoring melalui pengujian kualitas biodiesel di produsen dan depo atau *blending point* (tempat pencampuran bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar minyak (BBM)) sesuai spesifikasi biodiesel. Spesifikasi biodiesel ditetapkan melalui SNI Biodiesel 04-7182-2006, kemudian direvisi menjadi SNI Biodiesel 7182-2012 dan saat ini ditetapkan dalam SNI Biodiesel 7182-2015.

Adapun saat ini telah ditetapkan spesifikasi B100 untuk



implementasi B30 yang ditetapkan dalam Kepdirjen EBTKE Nomor 189K/10/DJE/2019, di mana parameter kualitas mutu B100 ini semakin ditingkatkan.

Sementara itu, spesifikasi B100 untuk implementasi B30 telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen EBTKE No. 189K/10/DJE/2019 yang mana parameter kualitas B100 semakin ditingkatkan. “Untuk spesifikasi B30-nya sendiri juga telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Migas No. 0234K/10/DJM.S/2019,” lanjut Feby.

“Dalam pelaksanaan program pemanfaatan BBN, Pemerintah sangat mempertimbangkan kualitas mutu BBN yang dicampur dalam BBM. Spesifikasi biodiesel tersebut selalu kami tingkatkan untuk melindungi konsumen dengan tetap memperhatikan kemampuan produsen,” katanya.

Andriah Feby Misna menyampaikan, pemerintah sudah mulai dilaksanakan uji coba pemanfaatan B30 pada kereta api September 2019. Uji coba ini dilakukan pada genset kereta api selama 1.000 jam.

Uji coba B30 pada kereta api melibatkan beberapa stakeholder

terkait. Pihak yang terlibat antara lain Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Sarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PPPTMGB Lemigas.

Lalu, PPPTKEBTKE, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), PT KAI (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), PT Volvo, dan PT Inka.

Feby menyebut, uji coba B30 pada kereta api merupakan salah satu persiapan pemerintah dalam rangka implementasi program B30 yang dimulai tahun 2020 nanti. Kualitas produk biodiesel untuk pencampurannya pun semakin ditingkatkan, sehingga pengujian yang sedang dilaksanakan saat ini menggunakan bahan bakar B30 dengan kualitas mutu yang telah disepakati.

Untuk menjamin kualitas mutu biodiesel, pemerintah melakukan pengawasan lewat pengujian kualitas biodiesel di tempat produsen atau *blending point* yang merupakan tempat pencampuran bahan bakar minyak dan nabati. (*)

PERTAMINA MENYONGSONG ERA B30



PT Pertamina (Persero) telah mengambil inisiatif dan kesiapan untuk menghadapi transformasi bisnis energi dari minyak bumi (*fossil fuel*) kepada energi baru terbarukan. Salah satunya memperkuat dukungan di program B30.

"Pertamina sudah siap menjalankan B30 karena program ini memberikan kontribusi besar untuk menurunkan impor dan pendapatan bagi negara baik itu pajak maupun bukan pajak," ujar Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina.

Dijelaskan Nicke bahwa

kunci agar bisnis perusahaan bisa berkelanjutan dengan memperkuat lini bisnisnya. Artinya, perusahaan harus bisa fokus kepada satu bidang supaya bisnisnya tetap berkelanjutan. Pernyataan ini dikeluarkan saat ada pertanyaan niatan Pertamina masuk sektor hulu perkebunan sawit.

Ia menjelaskan fokus bisnis dari Pertamina adalah bisnis pengolahan minyak. Artinya, Pertamina hanya fokus untuk membangun infrastruktur kilang dan melakukan pemrosesan minyak sawit yang dipasok oleh mitra untuk dijadikan BBM.

"Bisnis jika ingin sustain harus berdasarkan *core* kompetensi. Bisnis kompetensi Pertamina adalah *procecing* artinya kilang. Sementara (minyak sawit) serahkan ke ahlinya," kata Nicke.

Menurutnya, tidaklah mudah mendapatkan pasokan minyak sawit. Karena Pertamina harus tarik menarik dengan industri lainnya

seperti makanan. Tapi ia, optimis pasokan sawit yang didapat Pertamina untuk memproduksi BBM ini akan tercukupi. Karena Pertamina sendiri sudah memiliki partner untuk memasok kebutuhan minyak sawit Pertamina.

Saat ini, dikatakan Nicke, Pertamina sudah memulai pengembangan bahan bakar nabati lainnya seperti jagung dan gandum. "Ada banyak gandum di Indonesia Timur maka kita bangun (fasilitas pengolahan) bioetanol di sana. Banyak tebu di Jatim, maka harus bangun bioetanol di sana," tukasnya.

Dalam kesempatan terpisah, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan penggunaan FAME yang berasal dari kelapa sawit merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam di Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia. Dengan penyerapan

FAME yang konsisten, maka dapat membantu menjaga kestabilan harga kelapa sawit sampai ke tingkat petani. Dengan demikian dampak positif B30 ini juga bisa terasa hingga ke sektor hulu industri kelapa sawit.

Rata-rata penyerapan FAME yang dilakukan Pertamina hingga Oktober 2019 sekitar 460 ribu KL per bulan untuk menghasilkan B20. Dengan adanya implementasi B30 secara penuh, maka penyerapan FAME akan meningkatkan menjadi 690 ribu KL per bulan atau sekitar 8,3 juta KL per tahun.

Ia menambahkan, hal ini juga akan memperkuat kemandirian energi nasional karena bahan baku untuk B30 seluruhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri.

"Hal ini sesuai dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional yang juga berdampak pada sektor industri lainnya," tambahnya dari laman resmi Pertamina.

Di sisi lain, penggunaan FAME yang terbuat dari bahan nabati juga akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan dari gas buang kendaraan dan sektor industri. Sehingga dengan tingkat kandungan nabati yang lebih tinggi dari sebelumnya maka dampak lingkungannya pun lebih rendah.

Seperti diketahui, Pertamina mulai melakukan pencampuran B30 di Terminal BBM Rewulu (Yogyakarta) dan Terminal BBM Boyolali (Jawa Tengah) pada Kamis (21/11). Dengan demikian masyarakat sudah bisa mendapatkan Biosolar B30 di SPBU yang mendapat pasokan dari Terminal BBM tersebut.

Proses ini dilanjutkan secara bertahap sehingga sampai Desember 2019, B30 akan disediakan melalui 8 titik pencampuran dan 28 titik pencampuran pada Januari 2020.

"Harga Biosolar dengan kandungan B30 ini tidak berubah dari sebelumnya. Sehingga

masyarakat dapat membelinya dengan harga yang sama," tambahnya

Pertamina berhasil melakukan uji coba pengembangan *green fuel* di Kilang Plaju dan Dumai secara *co-processing*, yaitu bahan baku nabati dicampur dengan bahan baku fosil dan diolah bersama-sama untuk menghasilkan *green gasoline* dan *green diesel*. Kilang Plaju akan memproduksi *green gasoline* dan Kilang Dumai akan memproduksi *green diesel*.

Ke depan, Pertamina juga akan membangun *green refinery* baru yang akan mampu mengolah 100% bahan baku nabati, tanpa campuran bahan bakar diesel, untuk menjadi *green diesel*.

Haryanto Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan neraca perdagangan adalah mencari alternatif pengganti BBM, yakni dengan mengembangkan biodiesel. "Kita jalankan program B20 dan B30. Sebanyak 30% BBM disubstitusi dengan biodiesel yang menggunakan bahan baku dari minyak sawit (CPO). Bahan bakar fosil kita gantikan dengan biodiesel," ujarnya.

Haryanto menjelaskan, konsumsi BBM terbesar berasal dari sektor transportasi, yaitu bensin dan solar. Untuk mengurangi penggunaan dua bahan bakar tersebut, pemerintah mendorong penggunaan biofuel untuk mensubstitusi solar digunakan biodiesel. Sementara itu untuk bensin dikembangkan bioetanol.

Widyawan Prawiraatmadja, Dewan Penasihat Pertamina

Energy Institute, menjelaskan transisi energi merupakan suatu keniscayaan. "Pertamina dapat mengimplementasikan keinginan pemerintah, seperti biofuel, tapi juga tetap *sustainable* dalam melakukan bisnis," katanya.

Menurut dia, Pertamina sudah siap menghadapi perkembangan global di bidang energi baru terbarukan, khususnya di sektor transportasi dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Dia memproyeksikan hingga 2050, sekitar 50 persen dari bahan bakar kendaraan bersumber dari biofuel. Di samping itu, pembangkitan listrik dari sumber daya baru terbarukan akan terus bertumbuh.

"Pertamina sudah terlibat langsung dalam pengembangan energi baru terbarukan untuk sektor transportasi, seperti pengembangan B20 dan baru-baru ini sudah meresmikan penggunaan B30," ujarnya.

Pertamina memproyeksikan energi fosil seperti minyak dan gas dan batubara, masih memainkan peran utama jika menggunakan *scenario business-as-usual*.

Berdasarkan *scenario Market as Driver* Pertamina, batubara masih mempunyai peran besar dalam bauran energi. Di samping itu, B30 dan E20 (Ethanol 20 persen) sudah diimplementasikan dibarengi dengan penggunaan solar *rooftop*, geothermal dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Sementara itu, berdasarkan skenario *Green as Possible*, Pertamina memproyeksikan terjadi transisi elektrifikasi yang masif dari sumber energi fosil ke sumber energi baru terbarukan. Bahan bakar B50 (Biosolar kadar 50 persen) dan E50 (Ethanol kadar 50 persen) sudah diaplikasikan dan pembangkit listrik energi baru terbarukan makin banyak terpasang. (*)

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar

DIPLOMASI MENJADI KUNCI KEBERLANJUTAN EKSPOR SAWIT

Mahendra Siregar resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri RI pada 25 Oktober 2019. Ia mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo yaitu mengamankan ekspor sawit di pasar global.

Mahendra Siregar dipercaya masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai Wakil Menteri Luar Negeri RI. Salah satu tugasnya adalah menjaga dan mengamankan keberlanjutan industri sawit Indonesia. Mahendra mengatakan, hal itu penting lantaran devisa ekspor sawit dapat mencapai Rp 300 triliun pada 2017. Itu sebabnya, Mahendra mengatakan jumlah hubungan bilateral akan ditingkatkan terutama bagi negara yang menjadi tujuan utama ekspor sawit seperti negara Asia Selatan. "Kita ingin mendorong bilateral saling menguntungkan baik perdagangan dan investasi. Untuk itu, pengusaha kita harus siap berinvestasi di luar negeri," ujarnya.

Selanjutnya, ia memaparkan upaya menuju kelapa sawit yang berkelanjutan melalui ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) harus diakui dan diperhitungkan oleh Uni Eropa terutama dalam tinjauan kriteria ILUC yang akan datang. Pemerintah akan mendorong dunia agar melihat aspek "*environmental footprint*" pada minyak nabati lainnya sebagaimana ditetapkan pada Industri kelapa sawit Indonesia.

"Kita akan melakukan pendekatan, penjelasan dan inisiatif untuk mendorong terpenuhinya sistem yang mendukung keberlanjutan seluruh minyak nabati dilihat dari semua aspek termasuk aspek SDGs dan sawit bisa menjadi pionir. Dengan demikian kita bisa menjamin permintaan global secara bertanggung jawab dengan minyak nabati berkelanjutan. Harus dilihat

juga minyak nabati lainnya, misalnya penggunaan bahan kimia pada minyak nabati eropa," kata Mahendra.

Menurutnya, dunia harus melihat sawit secara fair karena sawit bukan semata untuk memenuhi pasar Eropa saja namun juga pasar dunia yang akan tumbuh terus seiring dengan pertumbuhan populasi umat manusia. Kebutuhan akan minyak nabati tersebut harus direspon dengan minyak nabati yang berkelanjutan. Saat ini, sawit menjadi solusi utama sebagai minyak nabati berkelanjutan dimana sawit memiliki produktifitas 6-10 kali lipat lebih besar dengan penggunaan lahan yang lebih efisien dibandingkan dengan minyak nabati dunia lainnya.

Berkaitan dengan industri sawit, di tingkat global, kami menyampaikan bahwa sawit justru akan menjamin pengembangan minyak nabati dunia menuju ke produk berkelanjutan. Hal itu terjadi karena produktivitas yang tinggi, berada di area yang memberikan lapangan kerja cukup banyak. Nilai tambah yang tinggi serta aneka produk turunannya memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

"Presiden Joko Widodo menugasi kami untuk melakukan koordinasi, menentukan kebijakan serta langkah, bagaimana memperjuangkan kelapa sawit untuk kepentingan Indonesia. Kami tentu lebih siap," ujarnya.

Dari sisi kebijakan

perdagangan, sistem berbasis aturan perdagangan multilateral perlu ditinjau ulang dan harus mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang secara memadai, termasuk dalam hal CEPA Indo-EU. Regionalisme menjadi penting dimana ASEAN dan sekitarnya juga merupakan peluang pasar inti terbesar di dunia.

Minyak kelapa sawit harus memiliki tempat yang menonjol dalam agenda bilateral, regional, *Free trade agreement*, diskusi multilateral, negosiasi dan perjanjian. Namun demikian serapan pasar domestik tetap menjadi agenda utama pemerintah.

"Saat ini pasar minyak sawit terbesar dunia adalah Indonesia karena kita adalah konsumen terbesar maka kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi dengan baik untuk *edible oil* dan turunannya. Dalam 10 tahun kedepan mayoritas sawit yang dihasilkan akan terserap di dalam negeri dan sisanya ataupun turunannya akan diekspor," katanya. (*)



Kementerian ESDM pun memproyeksikan hingga lima tahun mendatang biaya investasi peningkatan pembangkit EBT mencapai USD36,95 miliar. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Sutijastoto.



INVESTASI PEMBANGKIT EBT BUTUH DANA US\$ 36,95 MILIAR

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, besaran biaya investasi tersebut dimaksudkan sebagai strategi memperluas pangsa pasar energi. "Nilai investasi tersebut bisa membantu meningkatkan pangsa pasar energi di tahun 2025," kata Agung di Jakarta, awal Desember 2019.

Lebih lanjut, Agung merinci nilai investasi tersebut terdiri dari PLT Panas Bumi sebesar USD17,45 miliar, PLT Air atau Mikrohidro senilai USD14,58 miliar, PLT Surya dan PLT Bayu senilai USD1,69 miliar, PLT Sampah senilai USD1,6 miliar, PLT Bioenergi senilai USD1,37 miliar dan PLT Hybrid sebesar USD0,26 miliar.

Jumlah rincian investasi PLT EBT tersebut, imbuh Agung, disesuaikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 - 2025. "RUPTL ini mengacu pada asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% per tahun sampai 2020 dan 6,5% pada 2025," jelas Agung.

Menurut Agung, angka investasi ini secara tidak langsung memberi dampak pada peningkatan kapasitas bauran pembangkit EBT di Indonesia menjadi 24.074 Mega Watt (MW) di tahun 2025 dari 10.335 MW di tahun 2019.

Kalau digambarkan perkembangannya selama lima tahun ke depan, kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 11.256 MW pada 2020, 12.887 pada 2021, 14.064 MW pada 2022 dan 2023 menjadi 15.184 MW dan 17.421 MW pada 2024.

Inovasi teknologi diyakini menjadi

salah satu faktor kunci pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pasalnya, keberhasilan pengembangan EBT salah satunya sangat bergantung pada inovasi dan kemajuan teknologi.

"Mengembangkan EBT membutuhkan investasi dalam jumlah besar, tetapi kemajuan teknologi akan memungkinkan EBT menjadi lebih terjangkau dan lebih ekonomis. Selain itu, keberhasilan pengembangan EBT akan merangsang pembangunan ekonomi," demikian disampaikan oleh Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur, Prahoro Yulijanto Nurtjahyo di depan peserta *The 2nd Indonesia Energy Transition Dialogue* (IETD).

Prahoro menyampaikan Pemerintah mengharapkan forum-forum seperti ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai media yang tidak saja untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik untuk mendukung pengembangan EBT, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan informasi mengenai pengembangan energi di Indonesia, khususnya teknologi energi.

"Diharapkan akan ada dukungan dan kerja sama dari para pemangku kepentingan termasuk IETD kepada Pemerintah. Ini adalah forum yang

tepat untuk membuka peluang untuk mengeksplorasi pemanfaatan energi terbarukan secara mendalam, khususnya teknologi energi," pungkasnya.

Pemanfaatan EBT menjadi salah satu program prioritas untuk mengurangi ketergantungan negara pada fosil, dan pada saatnya akan mendukung peningkatan stabilitas ekonomi nasional serta mengurangi risiko terkena dampak volatilitas harga bahan bakar global, mengurangi defisit neraca perdagangan nasional, meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan, dan memungkinkan Indonesia untuk memenuhi komitmen mitigasi perubahan iklim di bawah Paris Agreement.

Fabby Tumiwa, selaku Direktur Eksekutif IESR menuturkan bahwa pada tahun ini, konsep yang diusung fokus kepada pendalaman pemahaman transisi energi dengan mempelajari skenario transisi energi global, tren teknologi, potensi disrupsi sektor energi, dan kebijakan-kebijakan untuk memfasilitasi transisi energi yang adil. Dialog tahun kedua ini diharapkan dapat memperkuat konsep dan memfasilitasi diskusi transisi menuju energi bersih di tanah air untuk memastikan transisi energi yang lancar.

APROBI BERPARTISIPASI DALAM TRADE EXPO INDONESIA 2019



Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) kembali berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia 2019, ajang promosi ekspor tahunan berskala internasional, yang diadakan pada 16–20 Oktober 2019 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Tangerang, Banten.

“Banyak sekali pengunjung yang bertanya biodiesel dan manfaatnya.

Tidak hanya dari dalam negeri. Pengunjung dari negara lain juga bertanya,” ujar Felly, Staf Sekretariat APROBI, ketika di Booth APROBI.

Dalam pameran tahun ini, ada peta industri biodiesel yang menampilkan sebaran pabrik biodiesel dan kapasitas produksi

TEI 2019 bertemakan “Moving Forward to Serve the World” tersebut dibuka oleh Wakil Presiden RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla dan Menteri Perdagangan RI periode 2016-2019, Enggartiasto Lukita. Selain itu, 6.025 *buyers* dari 120 negara telah mendaftar untuk meramaikan gelaran ke-34 TEI ini.

Adapun negara-negara dengan jumlah *buyers* terbanyak selain Indonesia adalah Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Tiongkok, India, Thailand, Amerika Serikat (AS), Filipina, dan Sri Lanka.

TEI bukan hanya pameran semata; di acara ini *buyers* juga dapat melakukan perjanjian. Telah terjadwal

sekitar 84 penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 25 negara dari program misi pembelian (*buying mission*), diantaranya dengan Jepang, Malaysia, Spanyol, Somalia, India, dan Australia.

Dalam acara ini juga diserahkan Primaniyarta dan Primaduta Award 2019. Primaniyarta Award dianugerahkan kepada para eksportir berprestasi yang telah meningkatkan nilai ekspornya sekaligus menginspirasi. Sementara itu, Primaduta Award diberikan pada para *buyers* asing yang setia dan secara kontinu membeli produk lokal.

Tahun ini, ada 26 penerima penghargaan Primaniyarta Award serta 45 penerima Primaduta Award 2019.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan, Trade Expo Indonesia (TEI) ke-34 2019 sukses mencapai transaksi sebesar USD 10,96 miliar atau senilai Rp153,38 triliun. Nilai ini meningkat 29,04 persen dibanding pencapaian tahun lalu sebesar USD 8,49 miliar atau senilai Rp127,33 triliun.

Transaksi produk pada gelaran TEI 2019 meliputi transaksi perdagangan barang yang berasal dari penandatanganan kontrak perdagangan atau MoU (USD 698,34 juta), transaksi di stan pameran (USD 687,60 juta), misi dagang lokal (USD 50,63 juta), peninjauan kesepakatan dagang atau *business matching* (USD 67,11 juta), Kementerian Kelautan dan Perikanan (USD 10,43 juta), forum bisnis hortikultura (USD 8,78 juta), serta kuliner dan pangan nusa (USD 457,14 ribu). Sedangkan nilai transaksi perdagangan jasa sebesar USD 120,08 juta. Sementara itu, transaksi investasi berhasil membukukan nilai sebesar USD 9,29 miliar.

Pada TEI kali ini, negara dengan transaksi terbanyak yakni Mesir sebesar USD 270,51 juta atau sekitar 18,13 persen dari total nilai transaksi. Lanjut Jepang sebesar USD 260,01 juta (17,43 persen), China sebesar USD 201,52 juta (13,51 persen), India sebesar USD 96,71 juta (6,48 persen) dan Inggris sebesar USD 94,44 juta (6,33 persen).

Sedangkan produk yang paling diminati yakni makanan olahan sebesar USD 390,26 juta (26,16 persen), kertas dan produk kertas sebesar USD 289,64 juta (19,41 persen), kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) sebesar USD 166,65 juta (11,17 persen), produk pertanian sebesar USD 128,92 juta (8,64 persen), dan kopi kertas sebesar USD 111,85 juta (7,50 persen). (*)



MALAM APRESIASI UNTUK JONAN

Selama tiga tahun menjabat Menteri ESDM RI, Ignasius Jonan aktif mendukung pelaksanaan program mandatori biodiesel.

Jumat malam, 8 November 2019, para pengusaha biodiesel meriung di Westin Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka berkumpul menunggu Ignasius Jonan, Menteri ESDM RI periode 2016-2019. Acara bertemakan *Indonesian Biodiesel Leader Forum* ini dihadiri pula oleh perwakilan beberapa asosiasi seperti GAIKINDO, GAPKI, dan MAKSI.





PENYELESAIAN KASUS KARHUTLA BUTUH DATA PEMBUKTIAN ILMIAH

Penyelesaian perkara kebakaran hutan dan lahan membutuhkan bukti ilmiah (scientific evidence) sebagai dasar dari legal evidence (bukti hukum). Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat dan korporasi yang menjadi korban putusan hukum yang salah serta hanya berdasarkan tekanan kelompok tertentu dan LSM.

Musdalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pihaknya setuju dengan penegakan hukum dalam penyelesaian kasus karhutla, namun penyelesaiannya di persidangan tetap harus melalui bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

"*Scientific evidence* sangat penting sebagai dasar penyelesaian sengketa kahutla agar putusan hukumnya punya rasa keadilan. Selama bertahun-tahun, penyelesaian karhutla hanya sepihak yakni menggiring opini bahwa perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri sebagai penyebab utama karhutla," kata Musdalifah.

Hal ini dikatakan Musdalifah dalam *The 2nd International Conference on Natural Resources Environmental Conservation* bertema *Industrial Forest and Oil Palm Plantation Fire, Impacts and valuation of the Environmental Losses*, di Bogor, akhir November 2019.

Musdalifah menuturkan karhutla di Indonesia tidak terkait dengan pembukaan lahan sawit. Selain faktor manusia, bencana alam seperti el Nino serta peran dari tanggung jawab pengelola kawasan menjadi penting dalam penanganan karhutla.

Selama ini, ungkap Musdalifah hanya karena sentimen kelompok tertentu, semua

kesalahan ditimpakan pada satu pihak yakni industri sawit. Pihak-pihak ini perlu memahami bahwa Indonesia perlu membangun aktivitas industrinya melalui sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Sebagai pemerintah saya punya kepentingan untuk menjaga pertumbuhan sawit nasional," kata Musdalifah.

Kemenko, kata Musdalifah mengusulkan agar penyelesaian karhutla bisa diprioritaskan pada deteksi dini (*early warning*) dan pencegahan. Kalau melihat polanya, umumnya karhutla terjadi dalam 3-4 bulan dalam setahun.

Seharusnya 8 bulan tersisa dimanfaatkan untuk membangun kluster pengendalian karhutla dengan melibatkan masyarakat. "Kebakaran tidak sekedar mematikan api kemudian mencari tersangka dan menghukumnya. Perlu dipertimbangkan, suatu kawasan terkelola dengan baik agar kebakaran tidak perlu terjadi berulang," kata dia.

Pentingnya bukti ilmiah juga dikemukakan Dirjen Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani yang diwakili Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum LHK Yazid Nurhuda.

Menurut Yazid pembuktian ilmiah sebagai dasar dan bukti hukum dalam konteks beracara di pengadilan agar

menjadi solusi dalam penyelesaian karhutla di Indonesia. Karena itu, peran dari para saksi ahli yakni para akademisi menjadi sangat penting.

"Berdasarkan sampel hasil uji laboratorium, saksi ahli akan menetapkan *scientific evidence* menjadi *legal evidence* melalui surat keterangan saksi ahli. Hal ini akan menjamin kepastian hukum," ujar dia.

Wakil Rektor IPB Prof Dr Agus Purwito Msc Agr mengingatkan perlunya kajian berbasis data ilmiah untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan di Indonesia.

"Kajian ilmiah diperlukan agar berbagai persoalan yang jadi penyebab kebakaran bisa diselesaikan. Pasalnya, karhutla di Indonesia tidak hanya merugikan dari sisi investasi, tetapi banyak hal seperti kesehatan manusia dan hubungan antara negara."

Director of Tropical Peat Research Laboratory Unit (TPRL) Malaysia Lulie Melling mengatakan, isu mengenai karhutla dikaitkan dengan keberadaan perkebunan sawit menjadi isu yang menarik di forum global. Hanya sayangnya, selama ini pemahaman mengenai gambut tropis didominasi pemahaman barat.

Seharusnya, ungkap Lulie, perlu dibangun pemahaman baru dari para pemangku kepentingan di Indonesia dengan melibatkan peran petani pekebun sawit dengan kearifan lokalnya. "Cara pencegahan dengan membangun pemahaman bersama di Indonesia lebih efektif dan tidak membutuhkan banyak biaya dibandingkan penanggulangan karhutla di gambut."

Ia pun menyaran supaya pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap hegemoni masyarakat Barat yang terus menerus memojokkan Indonesia terkait dengan pemanfaatan lahan gambut dan kebakaran. Pasalnya, kebakaran besar tidak saja terjadi di Indonesia melainkan juga di di California, Meksiko, Polandia dan Rusia. (*)